

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN
PENUMPANG MENINGGAL DAN LUKA-LUKA YANG TIDAK
TERDAFTAR DI DALAM MANIFEST PENUMPANG DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN**

Ilman Arifin

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum.
2. Soetrisno, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah pihak pengangkut bertanggungjawab atas kerugian penumpang yang tidak tercatat di dalam manifest penumpang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Antara pemilik KM Sinar Nusantara sebagai pengangkut dengan penumpang terikat oleh hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pengangkutan dimana pihak pengangkut berkewajiban mengangkut penumpang sampai tujuan dengan selamat sebagaimana diatur dalam pasal 38 UU No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Ketiadaan tiket dan/ atau nama penumpang didalam daftar manifest penumpang tidak membatalkan keabsahan perjanjian pengangkutan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kewajiban mencantumkan nama dan identitas penumpang dalam daftar manifest penumpang sebagai salah satu dokumen angkutan, adalah kewajiban pengangkut bukan penumpang, sehingga penumpang tidak boleh dirugikan atau kehilangan haknya atas ganti rugi akibat terjadinya kecelakaan KM Santika Nusantara hanya karena namanya tidak tercantum didalam manifest penumpang. Pembagian santunan/ganti rugi terhadap semua penumpang korban kecelakaan KM Santika Nusantara tanpa kecuali membuktikan bahwa semua penumpang adalah penumpang yang sah, sehingga berhak atas ganti rugi. Ketidak sesuaian antara jumlah penumpang dengan daftar manifest dengan jumlah penumpang riil yang ditemukan dan di evakuasi oleh pihak berwenang, sehingga menimbulkan kecelakaan kapal, telah memenuhi unsur Perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPer

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengangkut, Pelayaran

**RESPONSIBILITIES OF THE TRANSPORT PARTY ON PASSENGER
LOSS NUMBER 17 OF 2008 REGARDING PUBLIC LOSSES NOT
REGISTERED IN THE PASSENGER MANIFEST ARE REVIEWED BASED
ON LAW NUMBER 17 OF 2008 REGARDING SERVICE**

Ilman Arifin

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum.
2. Soetrisno, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

The purpose of writing a scientific journal is as a condition for graduation and earning a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of writing this thesis is to be able to find out whether the carrier is responsible for the loss of passengers that are not recorded in the passenger manifest, reviewed according to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. The following conclusions are drawn: Between the owner of KM Sinar Nusantara as a carrier and passengers is bound by legal relations in the form of a transportation agreement where the transport party is obliged to transport passengers to their destination safely as regulated in article 38 of Law No. 17 of 2008 concerning shipping. The absence of a ticket and / or passenger name in the passenger manifest list does not cancel the validity of the transportation agreement agreed by both parties. The obligation to include the name and identity of the passenger in the manifest list of passengers as one of the transport documents, is the obligation of the carrier not the passenger, so that the passenger must not be harmed or lose his right to compensation due to the KM Santika Nusantara accident just because his name is not listed in the passenger manifest. Distribution of compensation / compensation to all passengers victims of KM Santika Nusantara accident without exception proving that all passengers are legitimate passengers, so they are entitled to compensation. Discrepancy between the number of passengers and the list of manifests with the number of real passengers found and evacuated by the authorities, causing a ship accident, has fulfilled the element of unlawful acts as regulated in article 1365 of the Indonesian Criminal Code

Keywords: Responsibility, Carrier, Shipping